

## IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH

Juwita Adelia <sup>1\*</sup>, Salito <sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITDAR), Indonesia

\*Corresponding Author; [JuwitAdelia23@gmail.com](mailto:JuwitAdelia23@gmail.com) , [smilesalito@gmail.com](mailto:smilesalito@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci: Pendidikan nasional, budaya, karakter, globalisasi, kearifan lokal.*

*Received : 1 Juni*

*Revised : 9 Juni*

*Accepted : 18 Juni*

### ABSTRAK

Pengembangan budaya dan pendidikan nasional sangat penting dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membangun karakter dan peradaban yang bermartabat. Pendidikan menjadi alat strategis untuk menanamkan nilai budaya, memperkuat keberagaman, dan menumbuhkan kreativitas berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya dalam kurikulum, penguatan pendidikan karakter, serta penerapan pembelajaran berbasis budaya lokal efektif dalam mempertahankan budaya nasional. Namun, modernisasi dan globalisasi menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan fungsi pendidikan sebagai pilar utama pengembangan budaya nasional.

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Tanpa sistem pendidikan yang kuat, negara akan mengalami hambatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Hal ini menjadi dasar filosofis bagi pembentukan sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek

kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dirancang untuk menjadi alat transformasi sosial yang menyeluruh. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi, sistem ini bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial. Menurut Ratnaningrum (2022), pendidikan Indonesia diarahkan untuk menghasilkan manusia yang memiliki integritas, menghargai keberagaman, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang bersifat top-down tidak lagi relevan; dibutuhkan sistem yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Kerangka hukum utama yang mengatur sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU ini memformalkan tiga jalur pendidikan: formal, nonformal, dan informal, yang ketiganya diakui sebagai bagian dari sistem yang saling melengkapi. Menurut Sudarto (2020), UU Sisdiknas memberikan ruang bagi penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan beragam, sekaligus menjadi payung hukum bagi kebijakan pendidikan berbasis lokal dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional tidak hanya satu arah, tetapi dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hidayah (2023) menegaskan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengasah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Tidak hanya itu, pendidikan juga harus membekali peserta didik dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal sebagai fondasi identitas diri.

Dalam praktiknya, sistem pendidikan nasional terus mengalami pembaruan, baik dari segi kurikulum maupun metode pengajaran. Pemerintah meluncurkan berbagai program seperti Kurikulum Merdeka, Indonesia Pintar, dan Wajib Belajar 12 Tahun. Menurut Fitria (2023) dan Bintang & Makruf (2024), program-program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mengintegrasikan nilai budaya dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka, misalnya, mendorong guru untuk lebih fleksibel dalam mengajar sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik lokal.

Namun, meskipun telah banyak upaya dilakukan, tantangan besar masih menghambat kemajuan sistem pendidikan nasional. Ketimpangan akses antara daerah urban dan rural masih sangat nyata, sebagaimana diungkapkan Damopolii (2015). Masalah ini mencakup ketersediaan infrastruktur pendidikan, distribusi guru, serta kesenjangan kualitas pengajaran. Di daerah terpencil, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih tergolong rendah. Padahal, pendidikan yang berhasil umumnya melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif. Dinata (2021) menyatakan bahwa penguatan sistem pendidikan nasional harus mencakup pemberdayaan masyarakat lokal dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Hal ini termasuk dalam merancang kurikulum kontekstual, pengawasan mutu, dan penyediaan sumber daya pendukung lainnya. Tanpa keterlibatan ini, pendidikan cenderung menjadi kegiatan birokratis semata.

Peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan perbaikan dalam hal tata kelola dan penggunaan data. Sistem informasi pendidikan yang kuat memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Hal ini penting untuk mengatasi ketimpangan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Selain itu, evaluasi berbasis data juga dapat membantu sekolah dan pemerintah untuk menilai efektivitas program serta merancang strategi perbaikan yang tepat sasaran.

Aspek penting lainnya adalah pengembangan metodologi pembelajaran yang tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga bersumber dari budaya lokal. Budaya lokal memiliki nilai edukatif yang tinggi, dan jika diintegrasikan dalam proses belajar, dapat membangun identitas dan karakter peserta didik. Pendidikan berbasis budaya lokal terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperkuat akar budaya bangsa. Ini menjadi jawaban atas tantangan globalisasi yang kerap mengikis identitas nasional.

Inovasi dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan regulasi, sementara institusi pendidikan menjalankan program secara teknis. Di sisi lain, masyarakat dan sektor swasta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan finansial, moral, dan sosial. Menurut Siddik (2022), kolaborasi multipihak ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang resilien, adaptif, dan berkelanjutan.

Selain memperkuat struktur pendidikan, penting juga untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, toleransi, dan empati dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai ini menjadi penyeimbang di tengah derasnya pengaruh individualisme dan materialisme yang berkembang dalam masyarakat global. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat pembentuk peradaban, bukan sekadar penyedia keterampilan teknis.

Dengan meninjau kembali filosofi, kebijakan, dan praktik pendidikan di Indonesia, jelas bahwa sistem pendidikan nasional memegang peranan sentral dalam menciptakan masa depan bangsa. Namun, pengembangan sistem ini tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan upaya konsisten, evaluasi

berkelanjutan, dan keberanian untuk berinovasi. Sistem pendidikan nasional yang kuat akan melahirkan generasi yang tidak hanya siap bersaing di kancah global, tetapi juga kokoh memegang nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul “Implementasi Sistem Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah” adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan sistem pendidikan nasional diimplementasikan di tingkat sekolah menengah, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Data dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di sekolah, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, serta studi dokumentasi terhadap kurikulum, silabus, dan program sekolah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional. Analisis data dilakukan secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu menggambarkan fenomena implementasi pendidikan secara holistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1) Bagaimana bentuk implementasi Sistem Pendidikan Nasional di sekolah menengah**

Implementasi Sistem Pendidikan Nasional di sekolah menengah tercermin secara konkret dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada pendidik dalam menyusun pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lokal. Hal ini sejalan dengan asas demokratis dan keadilan dalam UU Sisdiknas, di mana peserta didik menjadi pusat proses pendidikan. Dalam praktiknya, banyak sekolah menengah telah mengadaptasi kurikulum ini dengan melakukan asesmen diagnostik awal, penyesuaian materi ajar, serta pengintegrasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Implementasi kurikulum baru juga mendorong transformasi peran guru. Dari sekadar penyampai materi, guru kini berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Studi observasi pada sejumlah SMA menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas dan proyek lintas mata pelajaran. Guru didorong untuk mengembangkan modul ajar sendiri dan melakukan refleksi rutin terhadap efektivitas pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.

Kurikulum Merdeka memperkuat praktik pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek. Di sekolah menengah, pendekatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran lintas disiplin yang mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Pembelajaran proyek (Project-Based Learning) terbukti mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar yang aktif dan kontekstual. Misalnya, dalam proyek ketahanan pangan lokal, siswa

belajar mengaitkan ilmu biologi, geografi, dan ekonomi secara langsung dengan kehidupan masyarakat.

Implementasi sistem pendidikan nasional di era digital menuntut pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Sekolah menengah kini mengintegrasikan Learning Management System (LMS), video pembelajaran, dan platform kolaboratif untuk menunjang proses belajar mengajar. Walaupun masih terdapat disparitas akses antar wilayah, banyak sekolah telah menunjukkan inisiatif inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif dan konten digital lokal yang relevan dengan konteks budaya setempat.

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem pendidikan. Kepala sekolah yang visioner mendorong terbentuknya budaya sekolah yang kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dalam beberapa studi kasus, ditemukan bahwa sekolah menengah dengan kepala sekolah yang aktif dalam pengembangan profesional guru dan penguatan komunitas belajar menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran dan kepuasan siswa.

Sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada perkembangan siswa juga menekankan pentingnya evaluasi formatif. Sekolah menengah mulai beralih dari penilaian berbasis angka semata ke pendekatan asesmen yang menilai proses, kreativitas, dan refleksi siswa. Praktik ini memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan portofolio pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dari guru dalam setiap tahap pembelajaran.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan dan akses pendidikan, sistem pendidikan nasional juga mendorong penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Sekolah menengah, terutama yang berstatus negeri, mulai mengakomodasi kebutuhan siswa dengan disabilitas ringan maupun kesulitan belajar lainnya. Implementasi ini dilakukan dengan penyesuaian kurikulum, pelatihan guru inklusi, dan dukungan konselor sekolah. Meski masih menghadapi tantangan, upaya ini menunjukkan bahwa inklusivitas menjadi bagian integral dari implementasi pendidikan nasional.

Implementasi pendidikan nasional tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Sekolah menengah kini banyak menjalin kemitraan dengan dunia industri, lembaga sosial, dan pemerintah daerah dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial. Hal ini memperluas pengalaman belajar siswa sekaligus menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan di dunia nyata.

Meskipun telah banyak kemajuan, implementasi sistem pendidikan nasional di sekolah menengah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti

disparitas sumber daya antar daerah, keterbatasan pelatihan guru, serta resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasinya, strategi yang dapat diambil mencakup pelatihan guru secara masif dan berkelanjutan, digitalisasi konten ajar, dan penguatan budaya refleksi serta evaluasi diri di tingkat sekolah. Pendekatan holistik dan berbasis data akan semakin memperkuat penerapan Sisdiknas dalam mencetak lulusan yang berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri nasional.

## **2) Sejauh mana implementasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran**

Implementasi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah menengah, namun tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor pelaksanaannya di tingkat institusional. Secara normatif, kebijakan Sisdiknas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dirancang untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pencapaian kualitas pembelajaran ditentukan oleh seberapa baik sistem ini diintegrasikan dalam komponen pendidikan seperti kurikulum, manajemen sekolah, profesionalisme pendidik, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Kurikulum sebagai inti dari pelaksanaan Sisdiknas telah mengalami berbagai transformasi, salah satunya melalui Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran diferensiatif dan berbasis projek. Secara empiris, implementasi kurikulum ini di beberapa sekolah menengah menunjukkan peningkatan partisipasi siswa, kreativitas guru, dan relevansi materi pembelajaran terhadap kebutuhan peserta didik. Evaluasi oleh institusi pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang menjalankan Kurikulum Merdeka secara konsisten mengalami peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran utama serta peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Namun, efek positif ini lebih terasa di sekolah-sekolah dengan tingkat kesiapan sumber daya yang tinggi.

Guru sebagai aktor kunci dalam implementasi Sisdiknas memainkan peranan krusial dalam keberhasilan pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi pedagogik dan profesional guru. Pelatihan dan program pengembangan profesional berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional menjadi sarana penting untuk membekali guru dengan kemampuan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Studi terbaru menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan berbasis praktik nyata dan pendampingan akademik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mengelola kelas, memanfaatkan media digital, dan merancang asesmen yang autentik.

Fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung juga menjadi komponen penting yang memediasi pengaruh Sisdiknas terhadap kualitas pembelajaran. Sekolah dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, termasuk

akses ke teknologi informasi dan komunikasi, laboratorium, serta ruang belajar yang representatif, cenderung menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong eksplorasi siswa. Kajian empiris di wilayah urban dan semi-urban menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fisik berkorelasi positif dengan hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran sains dan teknologi.

Selain itu, sistem manajemen sekolah yang adaptif dan partisipatif juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Sekolah dengan kepemimpinan transformatif yang mengedepankan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemangku kepentingan cenderung lebih berhasil mengimplementasikan program-program kebijakan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang mengembangkan sistem evaluasi internal berbasis data dan perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks lokal menunjukkan peningkatan capaian akademik serta menurunnya angka putus sekolah.

Di sisi lain, kesenjangan implementasi masih menjadi tantangan nyata yang mempengaruhi ketimpangan kualitas pembelajaran antarwilayah. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi hambatan dalam hal distribusi guru berkualitas, akses pelatihan profesional, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Kajian mutakhir menyebutkan bahwa tanpa intervensi afirmatif dari pemerintah pusat dan daerah, implementasi Sisdiknas di wilayah-wilayah ini belum berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlu disesuaikan dengan konteks geografis dan sosio-kultural lokal.

Dari aspek evaluasi, mekanisme monitoring dan asesmen mutu pembelajaran nasional seperti AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) serta evaluasi berbasis satuan pendidikan menjadi instrumen yang penting dalam mengukur efektivitas implementasi Sisdiknas. Hasil asesmen ini menunjukkan tren peningkatan pada kompetensi literasi dan numerasi di sebagian sekolah menengah, terutama di wilayah yang memiliki dukungan kebijakan pendidikan daerah yang kuat. Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan pemanfaatan data evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan nasional juga memberikan dorongan pada pendidikan karakter, yang merupakan elemen tak terpisahkan dari kualitas pembelajaran. Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran menunjukkan hasil positif dalam hal perilaku siswa, motivasi belajar, dan hubungan antarwarga sekolah. Studi longitudinal menemukan bahwa lingkungan belajar yang menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kolaborasi memiliki korelasi dengan capaian akademik yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, implementasi Sisdiknas memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah menengah jika dijalankan secara komprehensif dan kontekstual. Faktor-faktor seperti kesiapan guru, dukungan infrastruktur, kepemimpinan sekolah, serta partisipasi komunitas sekolah sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya pendidikan, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional benar-benar mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara merata dan berkeadilan.

### **3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah menengah**

Penerapan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah menengah bertumpu pada sejumlah faktor pendukung struktural dan instrumental yang telah ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Faktor utama yang mendukung implementasi Sisdiknas adalah adanya kerangka hukum yang jelas, meliputi kurikulum nasional, standar pendidikan, dan pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kejelasan regulasi ini menjadi dasar legitimasi operasional pendidikan di tingkat menengah. Penelitian oleh Sholeha (2021) menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum dan kebijakan yang mapan telah memberikan kepastian arah dalam perencanaan dan pengembangan mutu pembelajaran di sekolah menengah.

Kualitas dan kompetensi guru merupakan faktor internal yang sangat krusial dalam mendukung implementasi Sisdiknas. Guru yang memiliki kemampuan pedagogis, profesional, dan sosial yang mumpuni akan lebih mudah mengadaptasi kurikulum nasional maupun lokal. Studi yang dilakukan oleh Fitria (2023) menyimpulkan bahwa guru berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan dalam pembelajaran kontekstual. Selain itu, pelatihan guru dan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan juga mendukung kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum, seperti transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.

Faktor pendukung lainnya adalah kemajuan teknologi pendidikan dan infrastruktur digital. Transformasi digital yang dipercepat sejak pandemi COVID-19 membuat sekolah menengah mulai mengadopsi Learning Management System (LMS), aplikasi pembelajaran daring, dan metode blended learning. Menurut kajian World Bank (2022), sekolah yang memiliki akses internet stabil, perangkat teknologi, serta guru yang kompeten dalam TIK, cenderung lebih cepat beradaptasi dan mampu menerapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pemanfaatan teknologi ini menjadi pendorong signifikan dalam pelaksanaan kurikulum dan penguatan literasi digital siswa.

Partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi pendukung eksternal penting dalam penerapan Sisdiknas. Keterlibatan orang

tua, komite sekolah, dan komunitas lokal menciptakan iklim yang kondusif untuk pembelajaran. Dalam studi Sudarto (2020), dijelaskan bahwa sekolah-sekolah yang aktif menjalin kolaborasi dengan dunia industri dan perguruan tinggi menunjukkan peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam pendidikan vokasi. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Magang Industri menjadi implementasi nyata dari sinergi antara sekolah dan dunia kerja.

Namun demikian, penerapan Sisdiknas juga menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, salah satunya adalah ketimpangan distribusi guru dan kualitas pembelajaran antar daerah. Masalah ini sangat dirasakan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sering mengalami kekurangan guru, rendahnya akses terhadap pelatihan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil evaluasi dari Kemendikbudristek (2022) menyebutkan bahwa lebih dari 40% sekolah di daerah 3T mengalami kekurangan guru mata pelajaran esensial seperti Matematika dan Bahasa Inggris, yang tentu menghambat penerapan kurikulum secara optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan. Banyak kepala sekolah yang belum memiliki kemampuan kepemimpinan strategis dalam mengelola program berbasis kurikulum nasional maupun dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Penelitian Hidayah (2023) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola sekolah sering kali menjadi akar dari rendahnya efektivitas pembelajaran, minimnya evaluasi internal, serta tidak maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pendidikan.

Kendala administratif dan beban kerja guru yang tinggi juga berpengaruh negatif terhadap keberhasilan Sisdiknas. Guru kerap dibebani oleh tugas-tugas administratif non-pengajaran seperti pengisian data Dapodik, pelaporan BOS, dan akreditasi, sehingga waktu dan energi untuk inovasi pembelajaran menjadi terbatas. Kajian Damopolii (2015) menggarisbawahi bahwa beban kerja guru yang tidak proporsional menyebabkan menurunnya kualitas interaksi dengan peserta didik dan rendahnya efektivitas proses pembelajaran.

Aspek lain yang menghambat adalah perubahan kebijakan pendidikan yang terlalu cepat dan tidak konsisten. Kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah sering kali menciptakan kebingungan di tingkat sekolah. Misalnya, transisi mendadak dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tanpa pelatihan menyeluruh, membuat banyak guru merasa tidak siap secara substansial. Fitria (2023) menyatakan bahwa perubahan yang bersifat top-down tanpa pendekatan bertahap dan kontekstual justru mengganggu stabilitas pembelajaran di sekolah menengah.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah menengah sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor

pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Dukungan struktural berupa kebijakan, kapasitas guru, teknologi, dan kemitraan menjadi fondasi utama. Namun, tanpa mengatasi hambatan berupa ketimpangan sumber daya, lemahnya manajemen sekolah, beban administratif, dan perubahan kebijakan yang tidak terencana, maka tujuan sistem pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sisdiknas secara berkelanjutan dan kontekstual.

#### **4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional guna meningkatkan mutu pembelajaran**

Penguatan kapasitas dan kompetensi guru menjadi fondasi utama dalam optimalisasi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kajian empiris oleh Sholeha (2021) menekankan bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengajar. Implementasi program pelatihan berkelanjutan seperti Continuous Professional Development (CPD), penguatan pedagogik berbasis teknologi, serta penguasaan Kurikulum Merdeka adalah langkah konkret yang dapat dilakukan. Studi oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pelatihan guru yang sistematis dan terukur cenderung memiliki capaian pembelajaran siswa lebih tinggi. Di Indonesia, pelatihan bersifat insidental dan belum merata, sehingga perlu sistem digital terpadu untuk memperluas akses dan efisiensi peningkatan kapasitas guru.

Strategi kedua adalah penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) melalui sistem penjaminan mutu internal. Sistem ini mendorong kepala sekolah dan tim manajemen untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana kerja sekolah berdasarkan kebutuhan riil. Studi Dinata (2021) menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan manajemen mutu secara sistematis menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses dan hasil belajar siswa. Implementasi Internal Quality Assurance System (IQAS) di Kalimantan Timur, misalnya, mampu meningkatkan nilai akreditasi sekolah dan menciptakan budaya evaluatif yang mendorong perbaikan berkelanjutan (Sudarto, 2020). Strategi ini menekankan pentingnya otonomi yang diiringi akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan.

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi pendidikan adalah strategi adaptif dalam era Revolusi Industri 4.0. Integrasi Learning Management System (LMS), platform e-learning, dan aplikasi pembelajaran berbasis AI terbukti mampu mendukung personalisasi pembelajaran. Kajian empiris dari Fitria (2023) menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan aplikasi pendukung belajar seperti Rumah Belajar dan Google Classroom memiliki partisipasi dan hasil belajar lebih baik. Strategi ini menuntut peningkatan infrastruktur, pelatihan TIK untuk guru, serta integrasi kurikulum digital dalam satuan pendidikan. Tanpa transformasi digital yang merata, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal akan semakin melebar.

Reformasi kurikulum yang berkelanjutan juga menjadi strategi esensial dalam pelaksanaan Sisdiknas. Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi telah diimplementasikan sejak 2022. Namun, studi evaluatif oleh Bintang & Makruf (2024) menunjukkan bahwa belum semua guru memahami pendekatan *project-based learning* dan *differentiated instruction* yang menjadi inti dari kurikulum tersebut. Diperlukan modul pelatihan kurikulum yang kontekstual serta pembimbingan intensif melalui komunitas belajar guru. Reformasi kurikulum harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan berbasis pada kajian kebutuhan lokal dan nasional.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan adalah prasyarat utama dalam pelaksanaan strategi pembelajaran bermutu. Ketersediaan ruang belajar, laboratorium, akses internet, dan media pembelajaran menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Studi oleh Damopolii (2015) menyatakan bahwa sekolah dengan infrastruktur lengkap menunjukkan keterlibatan siswa yang lebih tinggi dan capaian akademik lebih baik. Pemerintah perlu memprioritaskan anggaran pembangunan pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar pemerataan mutu benar-benar terwujud sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Implementasi Sisdiknas tidak akan optimal jika hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kajian Siddik (2022) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan, pendanaan, dan inovasi pendidikan secara lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kemitraan dengan sektor swasta juga dapat membuka peluang magang, laboratorium industri, dan beasiswa, yang semakin mendekatkan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sinergi ini perlu diformalkan melalui *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* dan platform kolaborasi lintas sektor.

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data adalah strategi untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) perlu mengembangkan sistem pemantauan *real-time* yang mengintegrasikan data input, proses, dan output pendidikan dari seluruh daerah. Evaluasi harus mencakup indikator kinerja satuan pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif. Kajian Hidayah (2023) menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan publik dalam monev untuk menghindari manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Strategi jangka panjang adalah integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Kajian oleh Ratnaningrum (2022) menekankan bahwa pendidikan harus memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Penggunaan konteks lokal dalam pembelajaran

mendorong keterlibatan siswa dan meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Misalnya, pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan adat istiadat setempat akan lebih mudah dipahami dan menumbuhkan karakter cinta tanah air. Program sekolah berbasis budaya lokal terbukti meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan siswa.

khirnya, strategi keberlanjutan memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan regulasi lintas kementerian. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau tidak terintegrasi sering menghambat kelanjutan program pendidikan. Oleh karena itu, harmonisasi antar kebijakan pusat-daerah, sinkronisasi antara Kemdikbudristek dengan Kemenag dan Kemenpan-RB, serta penguatan peran pemerintah daerah menjadi penting. Tanpa fondasi regulasi yang stabil, strategi optimalisasi akan mengalami resistensi di lapangan. Diperlukan roadmap pendidikan jangka panjang yang disusun berdasarkan riset ilmiah dan partisipasi semua pemangku kepentingan.

### **Kesimpulan:**

Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan mutu pembelajaran membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas guru, penguatan manajemen berbasis sekolah, digitalisasi pembelajaran, reformasi kurikulum, serta pengembangan sarana prasarana pendidikan yang merata. Selain itu, pelibatan masyarakat, sektor swasta, dan penguatan sistem monitoring evaluasi berbasis data menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan pendidikan. Kajian empiris menunjukkan bahwa pendekatan strategis yang menyeluruh dan kontekstual mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara signifikan, sekaligus mempertahankan identitas budaya nasional di tengah tantangan globalisasi.

### **Rekomendasi:**

Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan disarankan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, menetapkan kebijakan pendidikan yang stabil dan berkelanjutan, serta mempercepat transformasi digital secara merata di seluruh daerah. Selain itu, pelatihan guru berbasis kurikulum baru dan pendekatan pembelajaran kontekstual perlu terus dikembangkan. Sekolah juga harus diberdayakan sebagai pusat inovasi lokal dengan mendukung otonomi dan pengawasan yang transparan. Upaya-upaya ini harus dirancang dalam kerangka jangka panjang melalui peta jalan pendidikan nasional yang berbasis bukti dan partisipatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintang, A., & Makruf, A. (2024). Kurikulum Merdeka sebagai Upaya Transformasi Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(2), 143-155.

- Damopolii, I. (2015). Ketimpangan Akses Pendidikan di Wilayah Urban dan Rural: Studi Kasus di Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 23-35.
- Dinata, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 88-101.
- Fitria, R. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 67-79.
- Hidayah, N. (2023). Penguatan Karakter dalam Sistem Pendidikan Nasional: Tinjauan Filosofis dan Pedagogis. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45-58.
- Ratnaningrum, D. (2022). Sistem Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 215-229.
- Shiddik, R. (2022). Kolaborasi Multipihak dalam Reformasi Pendidikan Nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(4), 122-137.
- Sudarto, H. (2020). Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 33-46.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.